

Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Sektor Peningkatan PAD Sektor Retribusi Pasar di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara

Dewi Sartika Marna^{1*}, Yuni Mega Itrantoy¹, Albertina Fauwawan¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : tikamarna9@gmail.com

Article History:

Received : 07-04-2025

Accepted : 13-04-2025

Keywords: Strategi Bapenda; Peningkatan PAD; Retribusi Pasar Langgur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah sektor retribusi pasar langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Informan kunci dalam penelitian ini, Kepala Dinas Pendapatan (1) orang, dan Informan tambahan, Kepala Bidang Pendapatan (1) orang, Kepala pengelola pasar langgur (1) orang, petugas retribusi pasar Langgur (3) orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah, melakukan pendataan ulang terhadap wajib retribusi, melalui proses ini dapat terlihat peningkatan penerimaan retribusi terdapat tiga jenis wajib retribusi. Retribusi karcis, retribusi pasar sayur, retribusi pasar ikan. Pengelola yang handal, di perlukan kinerja yang handal untuk meningkatkan retribusi pasar langgur. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta, rencana kerja sama masih dalam kajian yang belum di implementasikan. Melakukan pembenahan terhadap pengelola retribusi namun terdapat hambatan penyewa yang keluar tanpa pemberitahuan. Penggunaan sistem elektronik, penerapan sistem masi menghadapi tantangan sehingga di perlukan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat dan petugas. Kesimpulanya dinas pendapatan kabupaten maluku tenggara memiliki peran dalam mengelola pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya, dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran. Pendapatan dan belanja daerah mudah dilakukan. APBD menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui pengetahuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan asli daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Menurut Halim (2004), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang untuk meningkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar kepada PAD. Retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona. Penerimaan disektor retribusi daerah dalam upaya menggali potensi daerah.

Menurut saragih (2002), menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi pasar dibanyak daerah, retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri urusan otonomi daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, konter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 28 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2023 anggaran retribusi jasa usaha dianggarkan sebesar RP 5.133.000.000.00 (lima miliar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) salah satunya yaitu retribusi terminal sebesar RP 1. 500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasar langgur merupakan salah satu pasar yang terletak di kabupaten Maluku Tenggara dan merupakan tempat terminal dari desa-desa di kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjual berbagai hasil perkebunan baik sayur mayur dan lain sebagainya serta pula hasil laut, ikan, kerang-kerangan, rumput laut dan berbagai kebutuhan sandang dan pangan. Kondisi ini memberikan dukungan dalam upaya untuk meningkatkan retribusi pasar sebagai unsur pendukung peningkatan PAD. Upaya pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara melalui badan pendapatan dan pengelolaan aset daerah kabupaten maluku tenggara meningkatkan PAD melalui retribusi dipasar langgur tahun 2023. Dengan demikian, indikator untuk pencapaian strategi retribusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam keadaan lapangan petugas penagihan karcis pada pasar langgur biasanya tidak dilakukan setiap hari bahkan terlihat seminggu hanya tiga kali hal ini membuat pendapatan retribusi dari pasar langgur tidak stabil sehingga tidak mendukung retribusi pendapatan asli daerah sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul terkait “Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan PAD sektor retribusi pasar di pasar langgur kabupaten maluku tenggara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kantor Badan Derah, Kabupaten Maluku Tenggara. Penulis memilih kepala Dinas Pendapatan sebagai informan kunci untuk memperoleh informasi utama. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami kasus yang diteliti secara mendalam serta menyajikannya dengan jelas kepada pihak lain. Melalui pendekatan kualitatif, penulis dapat menguraikan secara terperinci Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pasar Langgur.

PEMBAHASAN

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib retribusi

Setiap tahun dilakukan pendataan, khususnya di awal tahun, terhadap objek-objek wajib pajak retribusi yang baru. Melalui proses ini, dapat terlihat adanya peningkatan penerimaan retribusi di Pasar Langgur. Retribusi di Pasar Langgur terdiri dari tiga jenis, yaitu retribusi karcis, retribusi pasar sayur, dan retribusi pasar ikan. Saat ini, pasar ikan sedang dalam proses relokasi ke area pantai berdasarkan kebijakan dari presiden, sehingga terpisah dari pasar sayur. Selain itu, terdapat retribusi lokal yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan laporan pendapatan dari pengelola pasar. Setiap awal tahun, dilakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak di wilayah pasar Langgur karena biasanya terdapat penambahan pedagang baru maupun yang sudah tidak aktif. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah unit atau lokal yang aktif dalam tahun berjalan.

2. Pengelola yang handal

Pengelolaan merupakan sebuah proses yang mencakup pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan. Dalam proses ini, diperlukan kinerja yang handal dan konsisten dalam berbagai situasi guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta

Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum melalui Undang- Undang dan Perda Nomor 1 Tahun 2022 untuk menjalin kerja sama pengelolaan pasar dengan pihak ketiga. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diimplementasikan. Saat ini, pengelolaan pasar masih dilakukan secara mandiri oleh pemerintah, sementara infrastruktur dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ke depannya, opsi yang dipertimbangkan meliputi pembentukan BUMD khusus atau kerja sama dengan pihak ketiga. Sebelum direalisasikan, diperlukan persiapan regulasi dan aspek teknis-administratif untuk memastikan efektivitas dan transparansi kerja sama tersebut.

4. Melakukan pembenahan terhadap pengelola retribusi

Tahun ini telah dilakukan pembenahan dengan membuat denah Pasar Langgur guna memetakan potensi penerimaan retribusi tiap blok. Namun, terdapat hambatan berupa penyewa yang keluar tanpa pemberitahuan, sehingga memengaruhi akurasi data dan menurunkan penerimaan. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah berencana mendata dan menata pelataran di sekitar pasar untuk menambah unit lokal baru, demi meningkatkan penerimaan dan mencapai target retribusi tahun ini.

5. Penggunaan sistem elektronik

Penerapan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sejak 2019, Bapenda telah menggunakan sistem digital yang akan terus dikembangkan, termasuk melalui portal elektronik dan kerja sama dengan Bank Maluku. Penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat maupun petugas. Meski demikian, digitalisasi terbukti mempermudah transaksi, pelaporan, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas SDM di bidang pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memiliki peran strategis dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar, khususnya di Pasar Langgur. Pendataan ulang wajib retribusi dilakukan secara berkala setiap awal tahun guna memastikan seluruh potensi pendapatan tercakup. Retribusi pasar Langgur terbagi atas beberapa kategori, seperti retribusi karcis, retribusi pasar sayur, retribusi pasar ikan, dan retribusi lokal. Dinas telah menerapkan sistem berbasis digitalisasi untuk mengoptimalkan pembayaran retribusi guna menghindari pembayaran tunai yang rentan terhadap kebocoran pendapatan. Selain itu, dilakukan penagihan tepat waktu setelah penetapan diterbitkan guna mengurangi tunggakan. Evaluasi berkala juga diterapkan untuk mengidentifikasi faktor penghambat penerimaan retribusi serta mencari solusi agar target tahunan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, Y. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Bambang, P. (2003). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- [3] Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- [5] Putriani, E. (2016). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten Bulukumba”. Skripsi, FEBIS, Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar.
- [6] Sasmita, A. & Rahardjo. (2011). *Pengelola Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.